

## MANAJEMEN SEKOLAH DASAR BERBASIS AKUNTABILITAS KINERJA

**Syunu Trihantoyo<sup>1</sup>,**  
Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Surabaya

### **ABSTRACT**

*The complexity of global competition requires school as an educational institution to be able to compete. One of the efforts carried out to improve the management at the primary school level by implementing the concept of school-based management, where there are pillars of participation, transparency, and accountability. performance accountability is a form reporting of school accountability in carrying out the activities of school / school program, which consists of the components of school performance input-process-output simultaneously interrelated. Seven substance of school management has become a point of identifying the performance of the school. The seventh thing is the management of the curriculum, students, human resources, finance, infrastructure, public relations, and specialized services. Accountability of school performance can help schools, communities, and governments to recognize the profile and the achievement of more schools in the program.*

**Keywords:** *management education, elementary school, performance accountability*

### **ABSTRAK**

Kompleksnya persaingan global menuntut sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk mampu berkompetisi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan pada jenjang sekolah dasar dengan menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah, dimana terdapat pilar partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan aktifitas/ program sekolah, dimana kinerja sekolah terdiri dari komponen input-proses-output yang secara simultan saling berkait. Tujuh substansi manajemen sekolah menjadi poin dalam mengidentifikasi kinerja sekolah, ketujuh hal tersebut adalah manajemen kurikulum, peserta didik, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Adanya akuntabilitas kinerja sekolah dapat membantu sekolah, masyarakat, maupun pemerintah untuk mengenali profil dan ketercapaian program sekolah lebih dalam.

**Kata kunci:** manajemen pendidikan, sekolah dasar, akuntabilitas kinerja

---

<sup>1</sup>Korespondensi : Syunu Trihantoyo, S. Pd, M. Pd, Dosen Program Studi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya . Email: Email: Email: syunutrihantoyo@unesa.ac.id

## PENDAHULUAN

Tantangan sistem pendidikan di abad ke-21 semakin kompleks. Hal ini terlihat dari ketatnya persaingan pendidikan yang terjadi di beberapa negara berkembang, seperti Indonesia. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk berkompetisi supaya tetap *survive* dalam mengikuti ritme yang ada. Diperlukan berbagai upaya dalam menciptakan suatu jenis sistem pendidikan baru yang sesuai dengan perkembangan jaman. Sistem pendidikan yang mampu secara simultan merekonfigurasi kembali dirinya untuk menciptakan sumber nilai kearifan lokal baru dalam pendidikan. Hal ini mengindikasikan perlunya interaksi fungsi tata kelola yang berbeda, bukan sesuatu hal yang statis tetapi dinamis mengikuti perubahan yang ada.

Tidak halnya sekolah dasar, pada jenjang pendidikan ini juga diperlukan restrukturisasi tata kelola/ manajemen pendidikan yang dinamis. Adanya keleluasaan pengelolaan sekolah secara mandiri bisa menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan yang ada. Saat ini telah dilaksanakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep desentralisasi yang mengharuskan sekolah dasar mampu secara dinamis mengatur pengelolaan lembaganya secara

mandiri. Indonesia memiliki regulasi yang kuat terhadap hal ini, aturan yang berkait diantaranya adalah

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran yaitu terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school community based management*)”;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah.

Bagi sekolah dasar yang telah melaksanakan sistem MBS, maka sekolah tersebut juga telah melakukan prinsipnya, diantara pembelajaran inovatif, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam tulisan ini berfokus terhadap akuntabilitas sekolah yang didasarkan pada kinerja sekolah dasar.

Akuntabilitas kinerja sekolah merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan program

kegiatan kepada seluruh warga dan pengguna jasa pendidikan. Untuk itu sekolah perlu melakukan pemetaan program sekolah di awal tahun baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan melihat potensi yang dimiliki sekolah berupa sumber daya yang ada, dapat dijadikan sebagai bekal dalam menjalankan program-program yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap pembelajaran

Kinerja dapat dilihat dari komponen input, proses, dan output. Layaknya sebuah sistem, masing-masing komponen memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Komponen input berkaitan dengan aspek tenaga kependidikan, aspek siswa, aspek sarana dan pembiayaan. Komponen proses berkaitan dengan aspek kurikulum, aspek pengelolaan kelas, aspek penilaian, dan manajemen dan kepemimpinan. Komponen output berkenaan dengan prestasi siswa, prestasi guru dan kepala sekolah, serta prestasi sekolah.

Masing-masing komponen memiliki peran strategisnya sendiri, begitu juga dalam komponen proses, dimana penilaian kinerja guru berbasis profesional akan dapat mengukur kinerja guru sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga guru mampu menguasai materi

dan dapat memberikan penilaian sesuai bidang keahlian mata pelajaran/ level kelas yang dikelolanya (Lubna, 2014).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Manajemen Sekolah Dasar dalam Menerapkan MBS**

Sekolah dasar tidak ubahnya sebuah institusi atau lembaga. Sekolah mengemban misi tertentu yaitu melakukan proses edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi peserta didik, dalam rangka mengantarkan siswa siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi peserta didik dan melibatkan banyak komponen, sehingga aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusional sekolah dasar.

Secara etimologis, manajemen berasal dari kata '*management*' (Bahasa Inggris) yang berarti suatu proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non manusia dalam rangka mencapai tujuan secara efektif

dan efisien (*Burhanuddin, 2003; Cranz, 2008*). Sehingga dalam kegiatan manajemen terdapat beberapa unsur, diantaranya: proses, sumber daya (manusia atau non manusia), tujuan, dan pencapaian secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan dalam jenjang pendidikan dasar menjadi tuntunan dalam pengelolaan aspek manajerial maupun pembelajaran. Manajemen pendidikan berkaitan dengan penciptaan (*creating and or discovering*), pengorganisasian, pengawasan, bahkan mencari solusi terhadap permasalahan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan sebagai pedoman (*Begley & Leonard, 2005*).

Secara garis besar aktivitas pendidikan di sekolah dasar, baik negeri maupun swasta dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, aktivitas pembelajaran kurikuler, seperti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), pembelajaran Pendidikan Agama (PA), pembelajaran Bahasa Indonesia (BI), pembelajaran Matematika (Mat), pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); pembelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian (Kertakes), pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

(Penjaskes), pembelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Kedua, aktivitas pembelajaran ekstrakurikuler, seperti kegiatan pramuka, usaha kesehatan sekolah (UKS), olah raga, kesenian, dan patroli keamanan sekolah (PKS). Ketiga aktivitas pembelajaran lainnya dalam bentuk upacara bendera yang diselenggarakan pada setiap hari senin dan senam pagi. Masing-masing jenis aktivitas pembelajaran tersebut memiliki tujuan kurikuler. Namun semua aktivitas pembelajaran harus dipadukan sedemikian rupa dan diarahkan kepada pencapaian satu tujuan institusional sekolah dasar.

Dari ketiga aktivitas pokok di atas perlu manajemen sekolah dasar yang baik sehingga antara aktivitas pembelajaran satu dan lainnya tidak tumpang tindih serta fasilitas sekolah dapat didayagunakan secara maksimal. Dalam menjalankan aktivitas tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memiliki tugas dan peran masing-masing. Personil sekolah dasar terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran Pendidikan Agama, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan pesuruh sekolah.

Adapun sumber daya lain di sekolah dasar terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, buku teks, buku penunjang, buku bacaan, berbagai alat peraga, dan sebagainya. Agar dapat didayagunakan secara optimal dalam mencapai tujuan institusional sekolah dasar, semua komponen tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak personil dan fasilitas yang didayagunakan, semakin menuntut adanya manajemen sekolah dasar yang kompleks.

Setelah memahami karakteristik sekolah dasar seperti dijelaskan di atas, dapat ditarik dalam kajian manajemen pendidikan. Dimana berbagai sumber daya baik manusia maupun non-manusia diuraikan dalam substansi manajemen pendidikan. Terdapat tujuh substansi manajemen pendidikan, yaitu (1) kurikulum atau pembelajaran, (2) kesiswaan, (3) sumber daya manusia, (4) sarana dan prasarana, (5) keuangan, dan (6) hubungan masyarakat, dan (7) layanan khusus (Burhanuddin, 2003).

Pengelolaan substansi manajemen pendidikan tersebut perlu diwarnai dengan konsep MBS. Zajda and Gamage (2009) *decentralisation in education can be defined as the process of delegating or devolving authority and responsibility*

*concerning the distribution and the use of resources (e.g., finance, human and physical resources) by the central government to local schools.* Dimana sekolah memiliki kewenangan dalam mengatur sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sekolah. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya konsep MBS muncul sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sekolah.

Hasil penelitian Lurah and Haryanto (2014) menjelaskan tentang praktik MSB di sekolah dasar sebagai berikut.

- (1) SDIT Jabal Nur telah menerapkan MBS dan hal tersebut dapat diketahui melalui kemandirian yang dimiliki, baik kemandirian fisik maupun non-fisik, serta adanya partisipasi aktif *stakeholder*.
- (2) Peran kepala sekolah yang dominan dalam penerapan MBS adalah peran manajerial, karena kepala sekolah bisa memilih langsung siapa yang menjabat dalam struktur organisasi sekolah.
- (3) Peran sekolah dalam konteks MBS adalah sebagai motor penggerak bagi kehidupan sekolah. Peran tersebut adalah kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor,

pemimpin, wirausahawan, motivator, dan klimator.

- (4) Faktor penghambat dalam penerapan MBS adalah komunikasi yang belum berjalan dengan baik di sekolah serta kurangnya sosialisasi untuk penerapan MBS, sedangkan faktor pendukung adalah peran aktif warga sekolah dalam pelaksanaan MBS dan pemberian wewenang atau otonomi yang besar dari yayasan kepada sekolah.

Sekolah dasar yang telah menerapkan MBS akan memunculkan kemandirian sekolah dalam hal tata kelola. Hal ini berkaitan dengan tata kelola substansi manajemen pendidikan yang kewenangan penuh ada di sekolah masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, sekolah dapat melibatkan masyarakat dalam setiap aspek aktifitas sekolah. Hal ini perlu adanya komunikasi aktif antara sekolah dan masyarakat juga kesadaran akan pentingnya peran masing-masing.

## **B. Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pendidikan**

Akuntabilitas dalam dunia pendidikan merujuk pada pertanggungjawaban stakeholder (kepala sekolah) lembaga pendidikan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Akuntabilitas juga merupakan salah satu

prinsip *good governance* atau *corporate governance*. Istilah ini banyak digunakan dalam dunia bisnis atau pemerintahan. Seperti diungkapkan Martin (2006) bahwa '*corporate governance contributes to business prosperity but requires accountability*'.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kegiatan pelaporan terhadap suatu program dengan melihat alur kegiatan mulai dari input-proses-output. Kegiatan ini berfungsi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. McAdam et al. (2003) mendefinisikan '*accountability is holding people responsible for meeting standards*'. Sebagai pengelola pendidikan maka sangat penting mengetahui prinsip akuntabilitas dalam sekolah agar dapat mendeskripsikan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Terdapat banyak bentuk akuntabilitas di sekolah, mulai dari manajemen lembaga, pembelajaran, sampai mutu lulusan atau keterserapan lulusan dalam melanjutkan di sekolah unggul. Penulisan artikel ini fokus dalam akuntabilitas kinerja sekolah dasar, dimana sekolah perlu memetakan program sekolah guna menunjang visi dan misi sekolah. Kinerja berfokus pada program sekolah dasar dengan

mengidentifikasi input-proses-output. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok berikut.

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Proses (*proses*) adalah tempat berlangsungnya serangkaian aktifitas dengan melihat input yang ada untuk menghasilkan output, misalnya proses pembelajaran, kepemimpinan dalam organisasi.
3. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Kinerja dapat dilihat dari hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja

berkaitan dengan performansi personil sekolah yang mampu bekerja dan memberikan hasil kerja yang tepat dengan kriteria yang sudah ditentukan bersama, sehingga memberikan rasa puas kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Indonesia memiliki regulasi khusus mengatur tentang laporan akuntabilitas kinerja seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2006. Permendiknas ini memberikan pedoman kepada sekolah untuk dapat memetakan program yang dijalankan sekolah. Tampilan tabel yang cukup sederhana memudahkan sekolah dalam mengaplikasikannya dan membantu dalam menjalankan pelaporan pertanggungjawaban terhadap seluruh warga sekolah.

**Tabel 1 Format Pencapaian Kinerja Kegiatan (Sumber: Permendiknas Nomor 14 Tahun 2006)**

No.	Pilar/ Program/ Kegiatan	Input		Proses		Output			Capaian tahun lalu		Capaian Target Renstra	Outcome
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	% Capaian Program	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pimpinan Unit Utama												

Akuntabilitas kinerja memiliki peran penting dalam perencanaan strategis organisasi terutama dalam perencanaan pendidikan. Program yang telah dilaksanakan sekolah akan ditanyakan oleh komite sekolah dan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan jasa sekolah. Bentuk monitoring berupa deskripsi dari pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam perencanaan strategis. Deskripsi tersebut berupa perhitungan, pencatatan apa yang dimiliki, dilaksanakan dan yang terkait dalam pelaksanaan program. Proses perhitungan apa yang dimiliki tersebut dalam lembaga pendidikan yang harus dijelaskan kepala sekolah masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Akuntabilitas kinerja yang baik akan membawa transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan. Untuk itu tujuan adanya akuntabilitas kinerja sekolah agar tercipta sekolah yang baik dan terpercaya, serta memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Rumusan tujuan akuntabilitas ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi.

**C. Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja**

Pada dasarnya manajemen sekolah dasar berbasis akuntabilitas

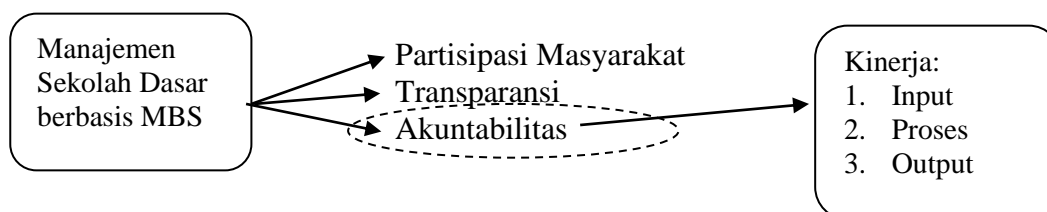


kinerja diawali dengan identifikasi aktifitas manajemen pendidikan. Dimana dalam kegiatan manajemen pendidikan terdapat substansi manajemen yang harus di kelola. Ketujuh substansi manajemen itu adalah manajemen kurikulum, keuangan, sumber daya manusia, peserta didik, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Pengelolaan didasarkan pada konsep MBS, dimana perlu adanya peran serta masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dimana ketiga komponen ini adalah pilar dalam MBS.

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pelaporan aktifitas terhadap kegiatan atau program yang telah dijalankan oleh sekolah. Dalam dunia sekolah Lohithakshan (2002) mengungkapkan bahwa *accountability in school management implies that those*

*who are involved in the delivering of goods (primarily teachers) are accountable to their clients (parents and public) for the outcomes and processes, of the school's activities.* Tentunya kegiatan ini terlaksana setelah sekolah mampu melibatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Transparansi perlu dibangun dalam setiap aktifitas sekolah, sehingga program yang berjalan dapat dikontrol oleh pihak luar sekolah. Peran komite sekolah beserta masyarakat luas yang memiliki kepentingan terhadap jasa pendidikan juga diharapkan aktif dalam kegiatan pengawasan aktifitas sekolah.

Dapat digambarkan tentang kerangka berpikir manajemen sekolah dasar berbasis kinerja sebagai berikut.



Gambar 1 Skema Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja

Adanya akuntabilitas kinerja sekolah dapat memberikan manfaat bagi sekolah, masyarakat, maupun Dinas Pendidikan. Pertama bagi sekolah, dokumen akuntabilitas kinerja sekolah

merupakan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. Kegiatan ini sekaligus menjadi bahan masukan untuk usaha pembinaan dan

pengembangan kinerja warga sekolah sebagai upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Dengan demikian potret kondisi sekolah dapat menjadi tolok ukur untuk persaingan kualitas sekolah pada pada tingkat pendidikan tertentu.

Kedua bagi masyarakat, melalui akuntabilitas kinerja sekolah diharapkan menjadi informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah. Sehingga secara sadar dan bertanggungjawab masyarakat dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat kaitannya dengan pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Ketiga bagi Dinas Pendidikan atau pemerintah, akuntabilitas kinerja sekolah dapat menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah dapat menggunakan akuntabilitas kinerja sekolah sebagai bahan evaluasi di masa mendatang dan sebagai alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Ketiga alasan di atas menjadikan manajemen sekolah dasar berbasis akuntabilitas kinerja penting

untuk dilakukan. Selanjutnya bagaimana sekolah berkerja untuk mencapai akuntabilitas kerjanya?

Sekolah memerlukan strategi dalam melaksanakan akuntabilitas kerjanya. Adanya identifikasi aktifitas input-proses-output menjadi alat pembantu dalam memudahkan pemetaan kondisi sekolah dengan melihat kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya sekolah dapat memasukkan setiap komponen tersebut guna mengidentifikasi realisasi target yang didapatkan. Realisasi target didapatkan setelah sekolah membandingkan antara perencanaan dan kenyataan baik pada masing-masing komponen maupun secara keseluruhan. Dengan demikian sekolah mampu membuat dokumen laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan pada kemajuan program yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih memudahkan, berikut matriks yang menjelaskan tentang komponen input-proses-output beserta dengan aspek dan indikatornya. Terdapat nilai berupa angka, sehingga sekolah mampu melihat secara kuantitatif besaran capaian kinerja yang telah dilakukan.

**Tabel 2 Pembobotan Komponen, Aspek, dan Indikator (Depdiknas, 2005)**

No.	Komponen	Aspek	Indikator
1.	Input (40)	Tenaga kependidikan (15)	Guru (7) Kepala sekolah (5) Karyawan (3)
		Kesiswaan (10)	Kondisi siswa (5) Prestasi siswa (5)
		Sarana (8)	Ruang kelas (2) Laboratorium (1) Perpustakaan (1) Ruang Kepala Sekolah (0,5) Ruang guru (0,5) Ruang Keterampilan/ Kesenian (0,5) Ruang tata usaha (0,5) Kamar Kecil (0,5) Lingkungan sekolah (0,5) Fasilitas Pendukung (1)
		Pembiayaan (7)	Sumber pendanaan (2) Penggunaan dana (3) Akuntabilitas penggunaan dana (2)
2.	Proses (30)	Kurikulum dan bahan ajar (5)	Kurikulum (1) Bahan ajar (3) Buku siswa (1)
		PBM (10)	Kesiapan guru (2) Pengelolaan Kelas (3) Metodologi Pengajaran (3) Penggunaan Media (2)
		Penilaian (5)	Kesiapan guru (2) Pelaksanaan Penilaian (3)
		Manajemen dan kepemimpinan (10)	Perencanaan (2) Implementasi program (4) Pengawasan (2) Kepemimpinan (2)
3.	Output (30)	Prestasi siswa (15)	Akademik (7) Non-akademik (4) Kepribadian (4)
		Prestasi guru dan kepala sekolah (7)	Prestasi guru (4) Prestasi kepala sekolah (3)
		Prestasi sekolah (8)	Akademik (5) Non-akademik (3)

Pada dasarnya ketujuh substansi manajemen pendidikan yang telah dijelaskan di atas, keseluruhannya telah masuk dalam matrik tersebut. Pada masing-masing sekolah dasar tentunya

telah memenuhi seluruh komponen yang ada, meskipun pada sekolah tertentu tingkat ketercapaiannya belum maksimal.

Untuk mendapatkan capaian angka secara kuantitatif, diperlukan

tindakan yang dinamakan pen-sekor-an. Pen-sekor-an dilakukan dengan menjumlahkan setiap detail 'indikator', sehingga jumlah maksimal masing-masing tidak melebihi dari angka yang ada di 'aspek'. Demikian halnya besaran nilai 'komponen' didapatkan dari penjumlahan

'aspek'. Dalam hal ini, masing-masing komponen disingkat dengan huruf Ki = sekor komponen input, Kp = sekor komponen proses, dan Ko = sekor komponen output. Maka nilai kinerja sekolah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Nilai KINERJA SEKOLAH} = \text{Nilai Ki} + \text{Nilai Kp} + \text{Nilai Ko}$$

Kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi kinerja sekolahnya, akan memberikan kemudahan bagi sekolah dalam melaporkan program sebagai bentuk aktifitas akuntabilitas kinerja. Sekolah mampu mengidentifikasi program beserta *progress* yang dilakukan dengan cermat dan detail. Hal ini akan memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan sekolah yang mampu melakukan manajemen sekolah dengan baik.

## PENUTUP

Pentingnya sekolah dasar melakukan tata kelola berbasis

akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kepercayaan sekolah terhadap berbagai macam tuntutan masyarakat yang dari waktu ke waktu yang selalu meningkat. Identifikasi substansi manajemen pendidikan kedalam format pelaporan kinerja sekolah secara tepat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sekolah. Sekolah dapat secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada kinerja sekolah melalui deskripsi program yang terpola. Dengan akuntabilitas kinerja, sekolah mampu mengidentifikasi tingkat keberhasilan, kendala, dan hambatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Begley, Paul T, & Leonard, Pauline E. (2005). *The Values of Educational Administration*. New York: Taylor and Francis Group.
- Burhanuddin, dkk. (2003). *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press.

- Cranz, Diane. (2008). *Cambridge Advance Learner's Dictionary: Third Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Depdiknas. (2005). *Kinerja Sekolah*. Jakarta: Dirjen PMPTK.
- Lohithakshan, P.M. (2002). *Dictionary of Education*. New Delhi: Kanishka Publishers.
- Lubna. (2014). *Akurasi dan Akuntabilitas Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Studi Keislaman*, Volume 18 Nomor 1.
- Lurah, Indra Haryanto Sindang, & Haryanto. (2014). *Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDIT Jabal Nur Gamping, Sleman Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 2 Nomor 2*.
- Martin, David. (2006). *Corporate Governance: Practical Guidance on Accountability Requirements*. London: Thorogood Publishing Ltd.
- McAdams, Donald R., Wisdom, Michelle, Glover, Sarah, & McClellan, Anne. (2003). *Urban School District Accountability Systems* Education Commission of the States.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zajda, Joseph, & Gamage, David. (2009). *Decentralisation, School-Based Management, and Quality*. London: Springer.